

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar ini mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 serta memuat arahan, Undang undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan , Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja serta Rincian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar pada periode 2021 - 2026.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2021

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BLITAR

AGUS SANTOSA, S. Sos, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Latar Belakang	BAB I-1
1.2 Landasan Hukum	BAB I-3
1.3 Maksud Tujuan	BAB I-6
1.4 Sistematika Penulisan	BAB I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAB II-1
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	BAB II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II-22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	BAB III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	BAB III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	BAB III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	BAB III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	BAB III-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	BAB III-10
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII-1
BAB VIII. PENUTUP	BAB VIII-1

DAFTAR TABEL

	Tabel	Hal
1	Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar	BAB II-14
2	Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAB II-16
3	Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB III- 2
4	Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB III-4
5	Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra K/L	BAB III-6
6	Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Provinsi	BAB III-7
7	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar	BAB IV-2
8	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	BAB V-3
9	Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAB VI-2
10	Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	BAB VII-2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Hal
1.1 Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan Renstra PD	BAB I-2
1.2 Gambar 1.2 Diagram Alir Ketersediaan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang lain	BAB I-4
1.3 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAB II-14
1.4 Gambar 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	BAB V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - yang disusun berpedoman kepada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman serta bersifat indikatif dan berpedoman kepada dokumen perencanaan Kab. Blitar yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Blitar tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Dokumen Renstra juga merupakan penuangan Visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yaitu Terwujudnya kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun. Warobbun Ghofur, ke dalam pogram, kegiatan subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama dalam kaitannya dengan aspek mandiri dan sejahtera.

1.1.2 Proses Penyusunan dan Fungsi Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman

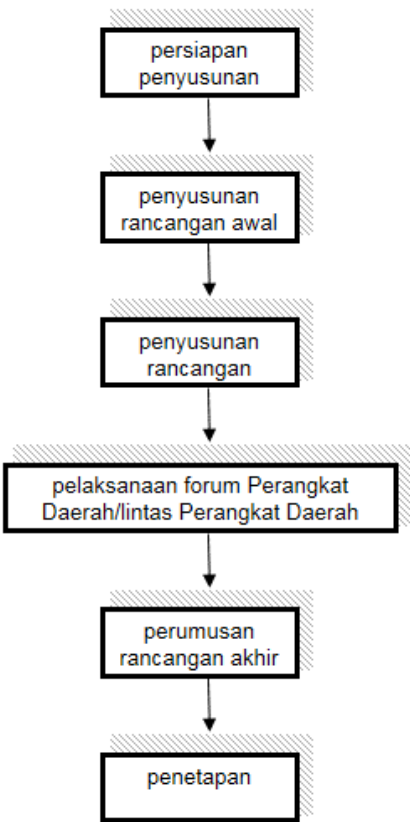
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar disusun berdasarkan tahap-tahap sebagaimana berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Untuk menggambarkan proses penyusunan Renstra, dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Diagram Alir Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman



Fungsi Dokumen Renstra adalah sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada gilirannya untuk bahan menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai salah satu Dinas Teknis Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, penyusunan Renstra yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak lepas dari dokumen perencanaan skala kabupaten yaitu RPJMD dan RPJPD. Dalam proses penyusunannya terdapat kaitan erat dimana perumusan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya rancangan Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman yang telah diverifikasi, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran digambarkan pada Gambar 1.2.

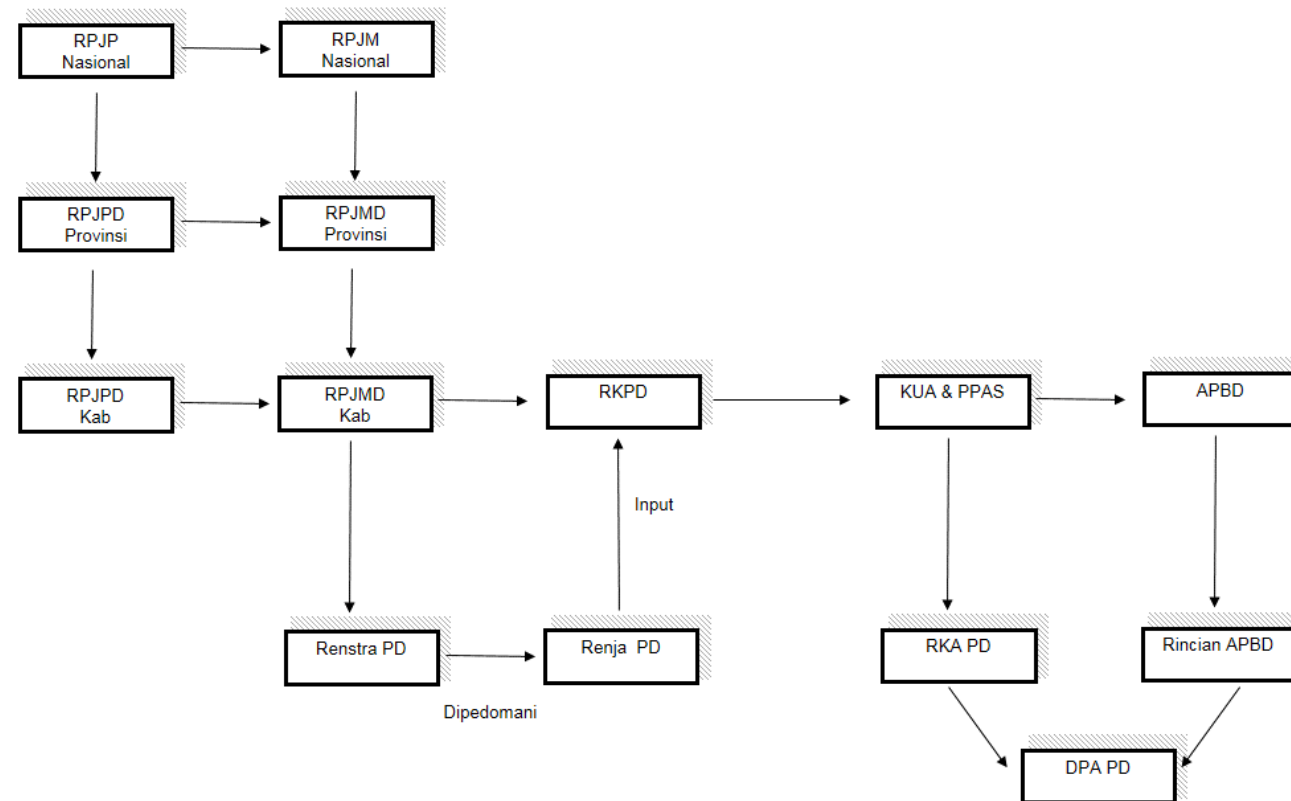
1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunannya. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum yakni antara lain:

1. Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Gambar 1.2

Diagram Alir Ketersediaan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang lain



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
11. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031
12. Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026 disusun dengan maksud:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang terukur selama periode Renstra Perangkat Daerah
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja PD sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
- d. Menjadi pedoman penyusunan Renja PD dan RKA PD

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun 2021-2026.
2. Menjadi penyelaras perencanaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar terhadap pembangunan Nasional.
3. Menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) PD dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, kebijakan teknis operasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional;
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas serta pelaporan pelaksanaannya;
2. penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga dinas;
3. penyusunan rencana anggaran belanja dinas dan rencana kebutuhan barang;
4. penyiapan bahan koordinasi dengan dinas, instansi dan unsur masyarakat;
5. pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas;
6. pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas;
7. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas;
8. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas;
9. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan;
10. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, pengiriman dan tata kearsipan, mengolah data administrasi kepegawaian;
2. menyusun rencana kebutuhan barang, mengurus administrasi barang, memelihara data administrasi kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang serta inventarisasi dinas;
3. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana serta keamanan kantor dinas;

4. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
5. menyelenggarakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
6. menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
3. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
4. Melaksanakan pengujian, penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
5. Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan;
6. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
7. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
8. Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan tugas dinas;

3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, proyek dan program kerja.
4. Menghimpun dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang program kerja dan kegiatan dinas;
5. Menghimpun, menganalisa dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
6. Mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memelihara data sebagai dokumentasi dinas;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretaris.

Bidang Perumahan

Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan dalam wilayah Kabupaten. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud bidang Perumahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis bidang perumahan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
7. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang perumahan;
8. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan;
9. Memberikan Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan\Pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan ; pemberdayaan pelaku bidang perumahan;
10. Pemberian dan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana menyelenggarakan rehabilitasi rumah tidak layak

huni; fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi; fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung

11. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidang perumahan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

1. Menyusun data base prasarana dan sarana perumahan
2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan di daerah;
3. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
4. Memberikan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
5. Rekomendasi teknis penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
6. Penyusunan kebijakan daerah tentang sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan utilitas umum PSU; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Perumahan Formal mempunyai Fungsi:

1. Menyusun data base perumahan formal yang ada di daerah;
2. Menyusun pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan;
3. Melaksanakan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;
4. Melaksanakan pembangunan rumah susun ;
5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, serta prasarana sarana dan utilitas pendukung perumahan;
6. Melaksanakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan;

7. Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pengembang perumahan; pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pendataan perumahan, lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya;
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;
4. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan swadaya dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
5. Melaksanakan sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma standar pedoman dan manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di tingkat daerah ;
6. Melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam wilayah Kabupaten Blitar. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan perencanaan teknis dan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman
2. Melakukan pengumpulan dan pendataan dalam bentuk data base penyehatan lingkungan permukiman;
3. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan air bersih, air limbah domestik dan drainase lingkungan permukiman
4. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana air bersih, air limbah domestik , dan drainase lingkungan kawasan permukiman;

5. Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang air bersih, air limbah dan drainase lingkungan permukiman; pengelolaan dan pengembangan air bersih di kawasan permukiman; fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka pembinaan air bersih dan air limbah kawasan permukiman kepada masyarakat; pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Air Bersih mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program air bersih;
2. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang air bersih;
4. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air minum kepada kecamatan, kelurahan, Desa serta kelompok masyarakat;
5. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan air bersih/ air minum;
6. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
7. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
8. pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air bersih;
9. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan SPAM kepada masyarakat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program air limbah kawasan permukiman;

2. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air limbah kepada kecamatan, kelurahan dan desa serta kelompok masyarakat;
3. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman ;
4. pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman;
5. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan air limbah kawasan permukiman kepada masyarakat;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program sarana dan prasarana kawasan permukiman seperti, drainase lingkungan dan jalan lingkungan :
2. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan drainase lingkungan ;
3. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana drainase lingkungan di kawasan Permukiman ;
4. pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan kawasan permukiman ;
5. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan drainase lingkungan kepada masyarakat ;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan;
7. penyelenggaraan infrastruktur drainase lingkungan kawasan permukiman di daerah;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Wilayah Kabupaten Blitar. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Bidang

Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan kebijakan teknis prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
7. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
8. Pelaksanaan fasilitasi teknis bidang prasarana dan pengembangan prasarana permukiman ;fasilitasi, penanganan, dan pencegahan kawasan kumuh;
9. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Seksi Jalan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan jalan lingkungan permukiman;
2. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan jalan lingkungan permukiman; pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman ;pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan permukiman;fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka

pembinaan pengelolaan jalan lingkungan lingkungan kepada masyarakat; pengelolaan dan pengembangan sistem jalan lingkungan; penyelenggaraan infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di daerah;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang;

Seksi Penanganan Kawasan Kumuh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan kumuh;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;
3. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan permukiman kumuh;
5. Menyenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
6. Pencegahan kawasan permukiman kumuh;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai Fungsi

1. Pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;
2. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan kawasan permukiman baru bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman di daerah;
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan kawasan permukiman;

6. Memberikan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pertanahan dalam wilayah Kabupaten. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja bidang pertanahan sesuai dengan program kerja dinas;
2. Pemberian rekomendasi teknis izin lokasi dalam daerah;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
6. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
7. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
8. Memberikan rekomendasi dalam rangka izin membuka tanah;
9. Merumuskan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Seksi Sengketa dan Ganti Rugi mempunyai fungsi :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa tanah;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian dalam ganti rugi tanah yang diperuntukkan kepentingan umum dan pembangunan;

3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sebagai bahan acuan untuk perumusan kebijakan dalam penanganan administrasi pertanahan;
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sengketa tanah garapan dalam daerah;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah;.
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
7. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan merumuskan bahan teknis kebijakan inventarisasi tanah;
2. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan tanah kosong, tanah ulayat.
3. Menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
4. Menyusun bahan rekomendasi teknis penerbitan ijin lokasi;
5. Menyusun bahan rekomendasi teknis penerbitan ijin membuka tanah;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

Seksi Pengadaan dan Penetapan mempunyai fungsi:

1. Memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah;
2. Menyusun bahan teknis penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
3. Menyusun bahan teknis penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada gambar. 2.1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut pangkat dan golongan dengan perlengkapannya seperti:

1. Pegawai yang mempunyai pendidikan mulai dan paska sarjana sampai dengan SMA.
2. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan karier
Adapun susunan pegawai terdapat didalam Bagan terlampir.

Perlengkapan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar yang sekarang berjumlah 42 (Empat puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

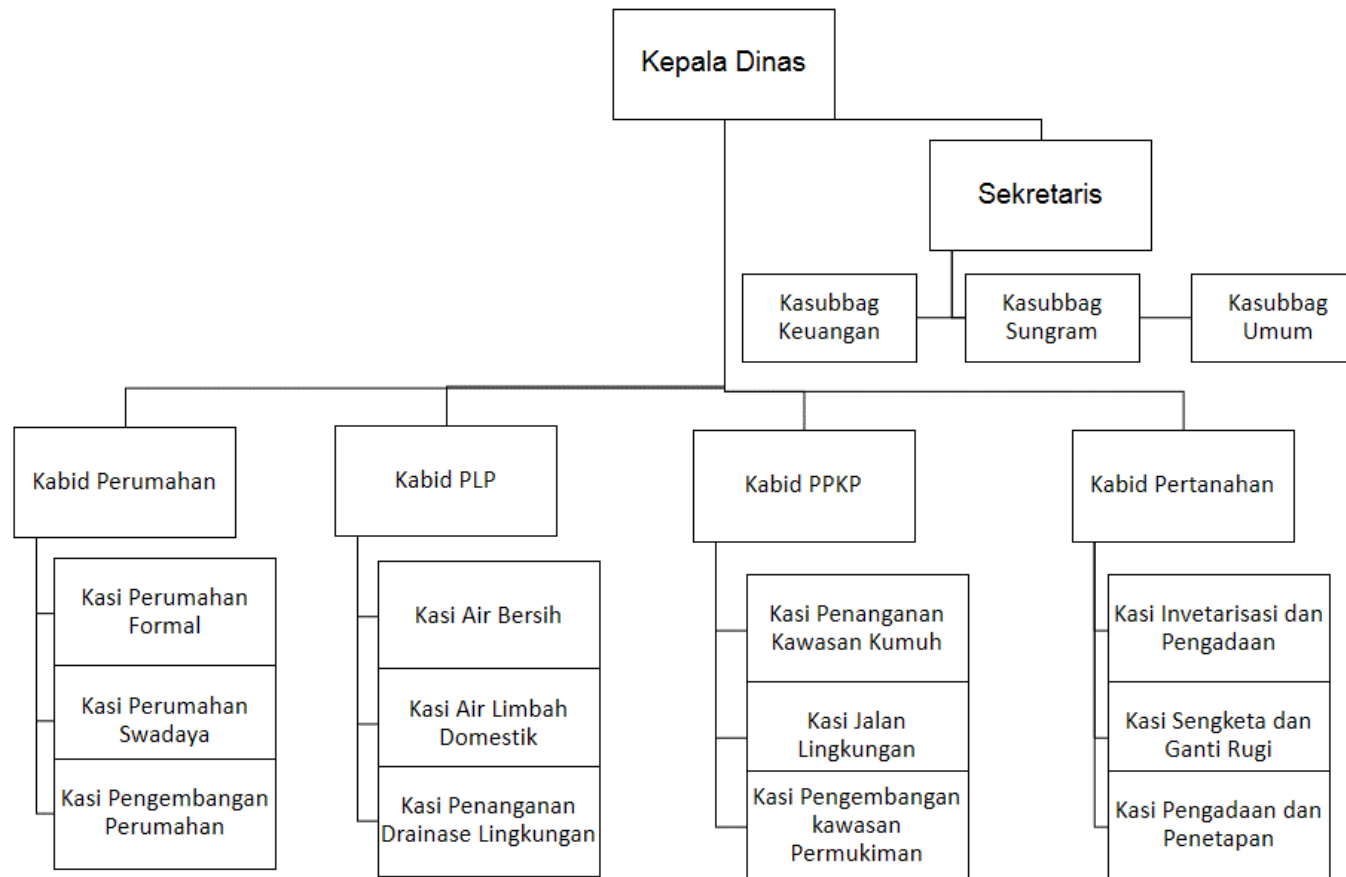
1. Gol IV = 11 Orang
2. Gol III = 22 Orang
3. Gol II = 9 Orang
4. Honorer = 10 Orang

PNS berdasarkan profesi / Kejuruan atau berdasarkan pendidikan terdiri dari:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pasca Sarjana (S2) Teknik | = 4 Orang |
| 2. <u>Pasca Sarjana (S2) Non Teknik</u> | <u>= 6 Orang</u> |
| Total | = 10 Orang |
| 3. Sarjana Teknik | = 13 Orang |
| 4. <u>Sarjana Non Teknis</u> | <u>= 4 Orang</u> |
| Total | = 17 Orang |
| 5. <u>Sarjana Muda (D3) Non Teknis</u> | <u>= 1 Orang</u> |
| Total | = 1 Orang |
| 6. SLTA Teknik | = 5 Orang |
| 7. SLTA Non Teknik | = 9 Orang |
| TOTAL | 42 Orang |

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar , maka telah diupayakan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan (Diklat) baik itu Diklat Fungsional maupun Diklat Struktural dan pada kondisi sekarang ini PNS yang sudah mengikuti Diklat struktural dengan Komposisi sebagai berikut:

- 1.Pim IV = 10 Orang
- 2. Pim III = 5 Orang
- 3. PIM II = 1 Orang
- Total = 16 Orang

Sebagaimana diamanatkan untuk kesetaraan gender, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki komposisi gender yang cukup berimbang sebagaimana berikut:

- Jumlah Laki Laki : 26 orang
- Jumlah Perempuan : 14 orang

2.2.2 Modal dan Aset

Pelayanan Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman didukung oleh asset dan barang modal berupa:

jenis	Jumlah
Kendaraan Bermotor	20
Mobil Penumpang	4
Mobil Pick Up	1
Laptop	20
AIO PC	15
Printer	25
Alat Ukur Lapangan	4

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah

Pelayanan Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman untuk periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Blitar

Program/Kegiatan	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan aparatur			70%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	142,9%	125,0%	111,1%	111,1%	100,0%
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur			0%	75%	80%	85%	90%	0%	0%	81%	0%	90%	0,0%	0,0%	101,8%	0,0%	100,0%

Program/Kegiatan	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti			10	10	10	10	10	0	0	53	0	10	0,0%	0,0%	530,0%	0,0%	100,0%
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen			30	30	10	10	10	30	30	10	10	10	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah			91,70%	92,95%	94,20%	95,45%	96,70%	96,83%	96,98%	97,13%	97,25%	97,37%	105,6%	104,3%	103,1%	101,9%	100,0%
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah RTLH yang direhab melalui DAK			382	429	450	450	450	379	281	168	145	450	99,2%	65,5%	37,3%	32,2%	100,0%
Fasilitasi dan Pendampingan	Jumlah RTLH yang			29	750	750	750	750	272	368	1.609	32	750	937,9%	49,1%	214,5%	4,3%	100,0%

Program/Kegiatan	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
n Rumah Swadaya	direhab melalui DAU																	
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi; Jumlah Kebijakan			5;1	5;1	5;1	5;1	5;1	11;1	14;1	13;1	13;1	5;1	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Jumlah Koordinasi; Jumlah Rekom Teknis			10;5	10;5	10;5	10;5	10;5	11;11	14;14	13;13	13;13	10;5	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Program Kesehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase RT berakses sanitasi layak			65,00%	67,00%	70,00%	75,0%	78,0 %	71,68 %	71,75%	71,93%	72,0 %	78,0%	110,3%	107,1%	102,8%	96,0%	100,0%
	prosentase RT berakses air bersih			74,00%	78,00%	84,00%	90,0%	95,0 %	75,56 %	79,10%	81,42%	82,3 %	83,2%	102,1%	101,4%	96,9%	91,4%	87,6%
	prosentase luas kawasan berakses drainase lingkungan			0,00%	10,00%	15,00%	20,0%	25,0 %	0,00 %	10,00%	15,00%	20,0 %	25,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Sarpras air bersih yang dibangun DAU			10	10	10	10	10	0	20	42	17	10	0,0%	200,0%	420,0%	170,0%	100,0%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	sarpras sanitasi dibangun DAK			6	8	8	8	8	1	5	10	75	8	16,7%	62,5%	125,0%	937,5%	100,0%
Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	sarpras sanitasi dibangun DAU			1	1	1	1	1	6	8	3	0	1	600,0%	800,0%	300,0%	0,0%	100,0%
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan	Panjang saluran drainase yang			3.200	3.200	3.250	3.200,0	3.350 ,0	2.141	12.399	8.826	9.555 ,4	3.350,0	66,9%	387,5%	271,6%	298,6%	100,0%

Program/Kegiatan	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Drainase Lingkungan	dibangun (m)																	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Sarpras air bersih yang dibangun DAK			9	9	9	9	9	0	3	11	10	9	0,0%	33,3%	122,2%	111,1%	100,0%
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	%Kawasan Kumuh			1,70%	1,50%	1,00%	0,50%	0,00%	1,70%	1,60%	0,80%	0,50%	0,00%	100,0%	106,7%	80,0%	100,0%	100,0%
Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	panjang jalan lingkungan yang dibangun (m)			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	6.979	39.553	44.730	57871	10.500	66,5%	376,7%	426,0%	551,2%	100,0%
Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi			3	3	3	3	3	0	3	3	2	3	0,0%	100,0%	100,0%	66,7%	100,0%
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan yang dikembangkan			3	3	3	3	3	0	3	3	0	3	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Jumlah Inventarisasi Permasalahan tanah			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Program/Kegiatan	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Perangkat Daerah Tahun ke					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Capaian IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021

NO	SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN				
	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Prosentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	96,83%	96,98%	97,13%	97,25%	97,37%
		Meningkatnya jumlah ketersediaan prasarana dasar permukiman	Prosentase Rumah Tangga berakses sanitasi	71,68%	71,75%	71,93%	72,00%	78,00%
			Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih	75,56%	79,10%	81,42%	82,30%	83,20%
			Prosentase Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	1,70%	1,60%	0,80%	0,50%	0,00%
2.	Meningkatnya pemanfaatan lahan	Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya target dari tiga program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat rutin. Meskipun demikian, tetap terdapat kendala dalam melaksanakan program ini seperti transisi dari aplikasi lokal seperti SIMDA, ePradah, menjadi aplikasi terpusat nasional yaitu SIPD.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak mencapai target karena anggaran dialihkan untuk program dan kegiatan yang bersifat lebih strategis.
3. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman memiliki 3 target, yaitu Persentase RT berakses air bersih, Persentase RT berakses air limbah, Persentase kawasan permukiman berakses drainase layak.
 - a. Cakupan air bersih tidak tercapai karena kondisi geografis dan profil mata air yang menyulitkan terutama di Blitar selatan, serta dampak refocusing anggaran COVID-19.
 - b. Target RT berakses air limbah tidak tercapai karena belum tersedianya tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur air limbah yang lebih luas serta refocusing anggaran COVID-19
 - c. Target permukiman berakses drainase layak masih belum dapat dicapai karena belum adanya master plan perencanaan drainase yang terintegrasi.

Sekalipun demikian, Program Penyehatan Lingkungan Perukiman telah membangun infrastruktur air bersih dan air limbah di lokasi yang sebelumnya belum memiliki akses tersebut. Ketidaktercapaian target sangat dipengaruhi oleh kondisi geologis daerah terutama daerah yang tidak memiliki potensi debit air yang memadai.

4. Program Pengembangan Perumahan dapat tercapai karena dukungan multisektor dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta dukungan anggaran.
5. Program Pengembangan Permukiman masih belum dapat memenuhi target dalam mengentaskan seluruh kawasan permukiman kumuh akibat perubahan kewenangan luasan kawasan kumuh yang menjadi urusan pemerintah daerah serta adanya refocusing anggaran COVID-19.

6. Program Fasilitasi Bidang Pertanahan dapat tercapai karena adanya dukungan anggaran, dukungan pihak terkait, serta masyarakat yang bersifat kooperatif.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh pemenuhan kebutuhan rumah.
2. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh pemenuhan infrastruktur dasar permukiman seperti sarana air bersih, air limbah, drainase, dan akses jalan.
3. Permasalahan Pertanahan seperti sengketa perkebunan

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perangkat Daerah memiliki kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan:

1. SDM yang kompeten terutama dalam bidang konstruksi, Pengadaan, dan teknologi informasi.
2. Memiliki akses terhadap anggaran

Kelemahan

1. Pekerjaan fisik yang kompleks terutama yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat memerlukan koordinasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga menghambat kecepatan pembangunan.
2. Meskipun SDM secara kualitas memadai untuk melakukan pekerjaan pembangunan, namun secara kuantitas jumlahnya sangat kurang dibandingkan dengan anggaran yang dikerjakan.
3. Tumpang tindih aplikasi yang justru menghambat kecepatan dan menimbulkan kompleksitas administrasi.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
2017-2020:																		
1	Belanja Tidak Langsung	2.996.229.750	2.863.769.700	4.143.168.800	3.952.346.800		2.952.211.209	2.834.651.374	3.834.152.077	3.906.187.077		98,5%	99,0%	92,5%	98,8%		131,91%	132,31%
2	Belanja Langsung:	15.522.647.217	41.776.232.000	53.562.129.600	42.708.205.821		14.080.792.768	28.867.513.591	51.163.433.055	42.232.138.380		90,7%	69,1%	95,5%	98,9%		275,13%	299,93%
	- Belanja Modal	12.711.012.717	28.885.672.500	37.999.460.100	35.260.519.950		11.833.778.000	26.371.528.564	36.169.420.977	34.984.298.750		93,1%	91,3%	95,2%	99,2%		277,40%	295,63%
	- Belanja Barjas	2.521.009.500	12.660.434.500	15.110.219.500	7.150.810.871		2.033.384.768	2.301.210.027	14.555.487.078	6.976.739.630		80,7%	18,2%	96,3%	97,6%		283,65%	343,11%
	- Belanja Pegawai	290.625.000	230.125.000	452.450.000	296.875.000		213.630.000	194.775.000	438.525.000	271.100.000		73,5%	84,6%	96,9%	91,3%		102,15%	126,90%
2021																		
1	Belanja Operasi					31.830.683.549					31.830.683.549					100,0%	100,00%	100,00%
2	Belanja Modal					43.644.253.541					43.644.253.541					100,0%	100,00%	100,00%
3	Bantuan Tidak terduga																	
4	Belanja Transfer																	

Program/Kegiatan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan aparatur	710.307.500	503.950.000	671.241.000	710.583.100	690.684.363	400.282.831	613.669.607	625.833.508	97,24%	79,43%	91,42%	88,07%
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	710.307.500	503.950.000	671.241.000	710.583.100	690.684.363	400.282.831	613.669.607	625.833.508	97,24%	79,43%	91,42%	88,07%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	494.531.500	594.693.400	396.700.000	148.150.000	490.712.800	553.327.800	366.666.500	141.682.100	99,23%	93,04%	92,43%	95,63%

Program/Kegiatan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	494.531.500	594.693.400	396.700.000	148.150.000	490.712.800	553.327.800	366.666.500	141.682.100	99,23%	93,04%	92,43%	95,63%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	0	0	389.000.000	0	0	0	381.055.000	0				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti	0	0	389.000.000	0	0	0	381.055.000	0			97,96%	
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	194.997.500	92.025.000	41.000.000	9.850.000	177.485.100	76.915.000	31.118.650	9.850.000	91,02%	83,58%	75,90%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	54.990.000	43.650.000	15.550.000	4.925.000	48.828.100	32.690.000	15.048.650	4.925.000	88,79%	74,89%	96,78%	100,00%
Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	42.807.500	48.375.000	25.450.000	4.925.000	41.357.000	44.225.000	15.048.650	4.925.000	96,61%	91,42%	59,13%	100,00%
Penatausahaan Pengelolaan Aset PD	Jumlah Aset	97.200.000	0	0	0	87.300.000	0	0	0	89,81%			
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pertambahan pemenuhan kebutuhan rumah	802.090.000	814.059.600	1.037.739.500	439.497.500	715.604.070	685.975.707	965.044.410	394.231.388	89,22%	84,27%	92,99%	89,70%
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah pertambahan RTLH yang	323.756.000	291.278.000	265.567.500	218.815.500	258.795.570	264.161.316	249.074.588	179.258.438	79,94%	90,69%	93,79%	81,92%

Program/Kegiatan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
	direhab melalui DAK												
Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	Jumlah pertambahan RTLH yang direhab melalui DAU	478.334.000	83.869.000	506.577.000	198.667.000	456.808.500	21.583.600	465.061.300	196.191.950	95,50%	25,73%	91,80%	98,75%
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	Jumlah Kebijakan	0	396.633.100	228.060.000	12.265.000	0	376.412.485	225.623.462	9.515.000		94,90%	98,93%	77,58%
Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Jumlah Koordinasi	0	42.279.500	37.535.000	9.750.000	0	23.818.306	25.285.060	9.266.000		56,34%	67,36%	95,04%
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase RT berakses sanitasi layak	11.105.657.217	17.400.993.500	27.301.252.100	23.060.857.350	10.166.227.435	15.921.376.484	25.753.723.105	22.845.824.614	91,54%	91,50%	94,33%	99,07%
	prosentase RT berakses air bersih												
	prosentase luas kawasan berakses drainase lingkungan												
Fasilitasi Pembinaan HIPPAM		224.850.000	0	0	0	224.100.000	0	0	0	99,67%			
Pendamping PAMSIMAS 2017		311.890.500	0	0	0	241.057.935	0	0	0	77,29%			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (SiLPA DAK IPD)		142.658.500	0	0	0	140.230.500	0	0	0	98,30%			
Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Sarpras air bersih yang dibangun	438.822.000	318.475.000	6.946.175.000	2.649.380.600	424.280.000	259.116.000	5.940.361.885	2.640.922.245	96,69%	81,36%	85,52%	99,68%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	sarpras sanitasi dibangun	3.814.193.000	2.357.718.000	5.363.523.850	9.724.158.000	3.738.428.000	2.279.399.150	5.333.810.426	9.713.185.619	98,01%	96,68%	99,45%	99,89%

Program/Kegiatan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	sarpras sanitasi dibangun	105.178.000	0	1.493.217.000	0	103.678.000	0	1.481.965.000	0	98,57%		99,25%	
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang dibangun	1.889.184.000	12.719.643.000	9.614.190.000	6.970.869.500	1.889.034.000	12.034.207.000	9.422.297.127	6.816.631.550	99,99%	94,61%	98,00%	97,79%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Sarpras air bersih yang dibangun	4.178.881.217	1.707.927.000	3.884.146.250	3.716.449.250	3.405.419.000	1.134.646.264	3.575.288.667	3.675.085.200	81,49%	66,43%	92,05%	98,89%
Pendampingan Dana APBN Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman		0	297.230.500	0	0	0	214.008.070	0	0		72,00%		
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase penurunan kawasan kumuh	1.840.926.000	12.121.295.500	12.820.787.000	12.812.105.100	1.832.538.500	10.966.617.219	12.393.397.798	12.689.575.000	99,54%	90,47%	96,67%	99,04%
Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	panjang jalan lingkungan yang dibangun	1.840.926.000	11.583.134.500	11.798.650.000	10.283.977.100	1.832.538.500	10.448.403.750	11.435.035.335	10.195.630.000	99,54%	90,20%	96,92%	99,14%
Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi	0	108.495.000	700.019.000	2.528.128.000	0	99.365.000	639.901.822	2.493.945.000		91,58%	91,41%	98,65%
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	0	374.666.000	322.118.000	0	0	370.954.500	318.460.641	0		99,01%	98,86%	
Pendampingan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Blitar		0	55.000.000	0	0	0	47.893.969	0	0		87,08%		
Program Fasilitasi Bidang Pertanian	Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	342.337.500	10.249.215.000	10.904.410.000	5.527.162.771	7.540.500	170.659.000	10.658.757.985	5.525.141.770	2,20%	1,67%	97,75%	99,96%
Fasilitasi dan Koordinasi	Jumlah Inventarisasi	0	55.500.000	246.015.000	18.625.000	0	54.975.000	245.015.000	18.625.000		99,05%	99,59%	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Permasalahan tanah												
Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan	116.785.000	10.132.650.000	10.480.120.000	5.453.787.771	0	54.975.000	10.246.936.296	5.451.816.770	0,00%	0,54%	97,77%	99,96%
Workshop/Sosialisasi Pertanahan		119.065.000	0	0	0	7.540.500	0		0	6,33%			
Penyuluhan hukum pertanahan		106.487.500	0	0	0	0	0		0	0,00%			
Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah	0	61.065.000	178.275.000	54.750.000	0	60.709.000	166.806.689	54.700.000		99,42%	93,57%	99,91%

Adapun peluang dan ancaman dalam hal pemenuhan perumahan dan infastruktur permukiman adalah:

Peluang

1. Sektor properti Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mengundang investor
2. Tumbuhnya Jasa Usaha Kontruksi yang kompeten sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan fisik dan pembangunan.

Ancaman:

1. Pertumbuhan penduduk tidak terkendali
2. Kondisi geografis dan geologis Kabupaten Blitar terutama bagian selatan yang sulit ditangani dengan anggaran dan teknologi yang dipunyai saat ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkaitan erat dengan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak huni dan ketersediaan infrastruktur Permukiman berkualitas yang merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur permukiman merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008-2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16.14%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dan Kabupaten Blitar dalam konteks khusus dapat membaik.

Salah satu permasalahan adalah terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dimana sejak digulirkannya era reformasi 2 (dua) dekade silam, maka terkait dengan penyediaan dana untuk melaksanakan fungsi dari dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar keterkaitan dengan persediaan dana yang ada, diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di semua lini, tetapi dengan ketersediaan dana yang ada menjadi permasalahan yang di hadapi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, sebagai contoh pada pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Blitar yang telah dilaksanakan sampai saat ini masih belum mencapai cakupan 100% mengingat keterbatasan dana yang ada. Selain itu, keterkaitan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi

dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur Permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Berdasarkan capain kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar . Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan per sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

Detail Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan Penduduk tidak dapat diimbangi oleh pemenuhan kebutuhan rumah layak dan infrastruktur penunjang permukiman	Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1. Tumbuh kembangnya Rumah tidak layak huni
		2. Adanya bencana yang menyebabkan kerusakan rumah warga
		3. Perlunya fasilitasi penyerahan dan pemeliharaan PSU yang dibangun pengembang permukiman
		4. Perlunya dokumen perencanaan perumahan
		5. Perlunya dokumen identifikasi kondisi perumahan
		6. Perlunya peraturan daerah sebagai dasar pengembangan perumahan
	Belum terpenuhinya penyediaan infrastruktur layak di Kawasan permukiman	1. Tumbuh kembangnya permukiman kumuh
		2. Kondisi geografis maupun geologis serta pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan penyediaan infrastruktur permukiman layak seperti air bersih dan air limbah
		3. Perlunya dokumen penanganan Kawasan kumuh
		4. Perlunya pembinaan kelompok masyarakat pengelola Kawasan permukiman kumuh.
	Adanya permasalahan sengketa perkebunan dan perlunya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1. Perlunya fasilitasi sengketa tanah
		2. Perlunya fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum
		3. Perlunya inventarisasi permasalahan tanah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021 - 2026 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Ibu Hj. Rini Syarifah dan Bapak H. Rahmat Santoso, SH. MH.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun. Warobbun Ghofur”

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:

- a. Mandiri berarti dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan bersifat swasembada, tidak tergantung pada daerah lain dan memiliki kedaulatan daerah
- b. Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Akhlak Mulia dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam kepribadian warganya
- d. Baldatun, Toyyibatun. Warobbun Ghofur memiliki makna Daerah yang gemah ripah loh jinawi.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan masyarakat dan kelestarian Lingkungan.

Misi tersebut dicapai melalui pembangunan infrastuktur penunjang kawasan permukiman, bak itu jalan, drainase, IPAL Komunal, Pipanisasi, Pembangunan Tandon. Selain itu, Pemerataan Pembangunan juga dicapai melalui rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

3.2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat

Berikut beberapa faktor pendorong dan pengambat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah:

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi: Terwujudnya kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun. Warobbun Ghofur			
Misi	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan masyarakat dan kelestarian Lingkungan	Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1. Tumbuh kembangnya Rumah tidak layak huni	1. Tumbuh kembangnya Rumah tidak layak huni
		2. Adanya bencana yang menyebabkan kerusakan rumah warga	2. Adanya bencana yang menyebabkan kerusakan rumah warga
		3. Perlunya fasilitasi penyerahan dan pemeliharaan PSU yang dibangun pengembang permukiman	3. Perlunya fasilitasi penyerahan dan pemeliharaan PSU yang dibangun pengembang permukiman
		4. Perlunya dokumen perencanaan perumahan	4. Perlunya dokumen perencanaan perumahan
		5. Perlunya dokumen identifikasi kondisi perumahan	5. Perlunya dokumen identifikasi kondisi perumahan
		6. Perlunya peraturan daerah sebagai	6. Perlunya peraturan daerah sebagai dasar

		dasar pengembangan perumahan	pengembangan perumahan
	Belum terpenuhinya penyediaan infrastruktur layak di Kawasan permukiman	1. Tumbuh kembangnya permukiman kumuh	1. Tumbuh kembangnya permukiman kumuh
		2. Kondisi geografis maupun geologis serta pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan penyediaan infrastruktur permukiman layak seperti air bersih dan air limbah	2. Kondisi geografis maupun geologis serta pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan penyediaan infrastruktur permukiman layak seperti air bersih dan air limbah
		3. Perlunya dokumen penanganan Kawasan kumuh	3. Perlunya dokumen penanganan Kawasan kumuh
		4. Perlunya pembinaan kelompok masyarakat pengelola Kawasan permukiman kumuh.	4. Perlunya pembinaan kelompok masyarakat pengelola Kawasan permukiman kumuh.
	Adanya permasalahan pertanahan	1. Perlunya fasilitasi sengketa tanah	1. Perlunya fasilitasi sengketa tanah
		2. Perlunya fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum	2. Perlunya fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum
		3. Perlunya inventarisasi permasalahan tanah	3. Perlunya inventarisasi permasalahan tanah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- b. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)

- c. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
- d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
- e. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Dari Visi Misi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar mengampu sasaran pertama dan ketiga yaitu “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,dan Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”,

Permasalahan Pelayanan Kementrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	1. Terbatasnya kapasitas air 2. Adanya tumpang tindih data dan aplikasi	1. Kesiapan SDM dan dukungan anggaran 2. Penyusunan database yang handal. 3. Dukungan masyarakat sekitar.
2	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Kondisi Ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar 2. Jumlah SDM bidang yang kurang memadai 3. Adanya tumpang tindih data dan aplikasi	1. Kesiapan SDM dan dukungan anggaran 2. Penyusunan database yang handal. 3. Dukungan masyarakat sekitar.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Visi Gubernur Jawa Timur Visi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Visi Pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong” dengan misi Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar mengampu tujuan ke 7 dari 8 tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air yang akan dicapai dengan : Pemenuhan infrastruktur dasar yang layak melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan serta Partisipatif.

Permasalahan Pelayanan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	1. Perbedaan kondisi organisasi antar Provinsi dan Daerah menyebabkan translasi kebijakan menjadi terhambat 2. Kondisi Topografi, geografi dan geologis Kabupaten Blitar terutama di Daerah Selatan 3. Refocusing penanganan pandemic COVID-19 4. Adanya tumpang tindih data dan aplikasi	1. Profesionalism dari SDM dan dukungan anggaran 2. Penyusunan database yang handal. 3. Dukungan masyarakat sekitar.
2	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Kondisi Ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar 2. Refocusing penanganan pandemic COVID-19 3. Jumlah SDM bidang yang kurang memadai 4. Adanya tumpang tindih data dan aplikasi	1. Kesiapan SDM dan dukungan anggaran 2. Penyusunan database yang handal. 3. Dukungan masyarakat sekitar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah Blitar dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

3.4.1.1 Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Blitar meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri peternakan di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum;
- b. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok;
- c. Pengembangan kawasan agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kanigoro
- d. Pengembangan komplek wisata di Pantai Serang dan Pantai Jolosutro; dan
- e. Pengembangan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berada pada: Kawasan Candi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nglegok; Candi Simping di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan; dan Candi Sawentar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan lindung di sekitar Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari.

3.4.1.2 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kabupaten Blitar merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pola ruang untuk kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;

- f. kawasan cagar geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya

Pola ruang untuk kawasan budidaya terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

3.4.1.3 Daerah Irigasi

Daerah irigasi merupakan bagian dari jaringan prasarana sumber daya air yang ada di Kabupaten Blitar. Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi:

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. Daerah Irigasi (DI);
- c. Prasarana air baku untuk air bersih; dan
- d. Sistem pengendalian banjir.

Daerah irigasi telah terbagi atas beberapa wilayah tiap desa di Kabupaten Blitar sesuai dengan aturan RTRW Kabupaten Blitar yang tertuang dalam lampiran ke 2. Dijelaskan daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah irigasi dan luas kawasan tersebut

3.4.1.4 Potensi Bencana

Kondisi Topografis Kabupaten Blitar yang terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai, lereng gunung Kelud. Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam seperti pada:

- a. Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan Kabupaten Blitar, meliputi kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung;

- b. Daerah rawan bencana Gunung Berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat;
- c. Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
- d. Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar atau yang kemudian disingkat KLHS RPJMD KABUPATEN BLITAR menempatkan Air bersih dan sanitasi sebagai Salah satu isu utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs).

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan ini kemudian melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menterjemahkan isu tersebut melalui pembangunan infrastruktur air bersih maupun air limbah.

Proyeksi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu utama bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan pemenuhan kebutuhan rumah dan infrastruktur dasar penunjang permukiman. Terkait hal tersebut , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar melakukan pembangunan infrastuktur dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan 3.7

Tabel 3.5

Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs)

No	Indikator	Capaian Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	83,2%	84,1%	85%	85,9%	86,8%	87,7%
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	83,2%	84,1%	85%	85,9%	86,8%	87,7%
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	72,2%	72,3%	72,5%	72,7%	72,8%	72,9%
4	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	72,2%	72,3%	72,5%	72,7%	72,8%	72,9%

Tabel 3.6
RENCANA TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA PELAYANAN DASAR									
		PENERIMA LAYANAN		SATUAN	CAPAIAN TARGET TH. 2020	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah yang harus dilayani :									
		1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	unit	-	-	1	1	1	1	1
		2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	unit	-	3	3	2	3	3	4
		3	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	unit	2	2	2	4	2	4	2
		4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	unit	-	-	1	1	1	1	1

Tabel 3.6
RENCANA TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS PELAYANA N	PENERIMA PELAYANAN DASAR									
		PENERIMA LAYANAN		SATUAN	CAPAIAN TARGET TH. 2020	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah yang harus dilayani :									
		1	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Sambunga n Rumah (SR)	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		2	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah yang harus dilayani :									
		1	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Rumah Tangga (RT)	37.932	38.232	38.532	38.832	39.132	39.432	39.73 2
		2	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih	Rumah Tangga (RT)	290.049	290.549	300.049	300.54 9	310.049	310.04 9	310.5 49

			besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan								
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah yang harus dilayani :									
		3	Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	Rumah Tangga (RT)	22.453	22.953	23.453	23.953	24.453	25.453	25.953

Tabel 3.7
Capaian SPM Perumahan 5 Tahun Terakhir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi									
					2016		2017		2018		2019		2020	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	7	100,0%

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%
---	--	--	------	--------------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

Tabel 3.7
Capaian SPM Permukiman 5 tahun Terakhir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi							
					2017		2018		2019		2020	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun	924.662	75,56%	967.982	79,10%	996.373	81,42%	1.007.142	82,30%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun	877.180	71,68%	878.037	71,75%	880.240	71,93%	881.096	72,00%

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penterjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah yang spesifik dan terukur dalam jangka menengah.

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara garis mengacu pada Misi IV (empat) yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui Pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

Untuk melaksanakan Misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman.
2. Meningkatnya ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman dengan sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh.
3. Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan dengan sasaran Terfasilitasinya permasalahan tanah garapan, obyek ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Pernyataan tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat lebih detail pada table 4.1

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Blitar**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Prosentase RT berakses infrastruktur permukiman	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman	Prosentase RT berakses air minum, pengolahan air limbah domestik, dan drainase	82,30%	83,2%	84,1%	85,0%	85,9%	86,8%	87,7%	87,7%
				72%	72,2%	72,3%	72,5%	72,7%	72,8%	72,9%	72,9%
				16,67%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%
Meningkatnya ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	Prosentase ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	Prosentase Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	97,25%	97,30%	97,35%	97,40%	97,45%	97,50%	97,55%	97,55%
				0,49%	0,31%	0,25%	0,18%	0,12%	0,05%	0,00%	0,00%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	Terfasilitasinya permasalahan Tanah	Terfasilitasinya permasalahan tanah garapan, obyek ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Prosentase permasalahan tanah garapan, obyek ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026.

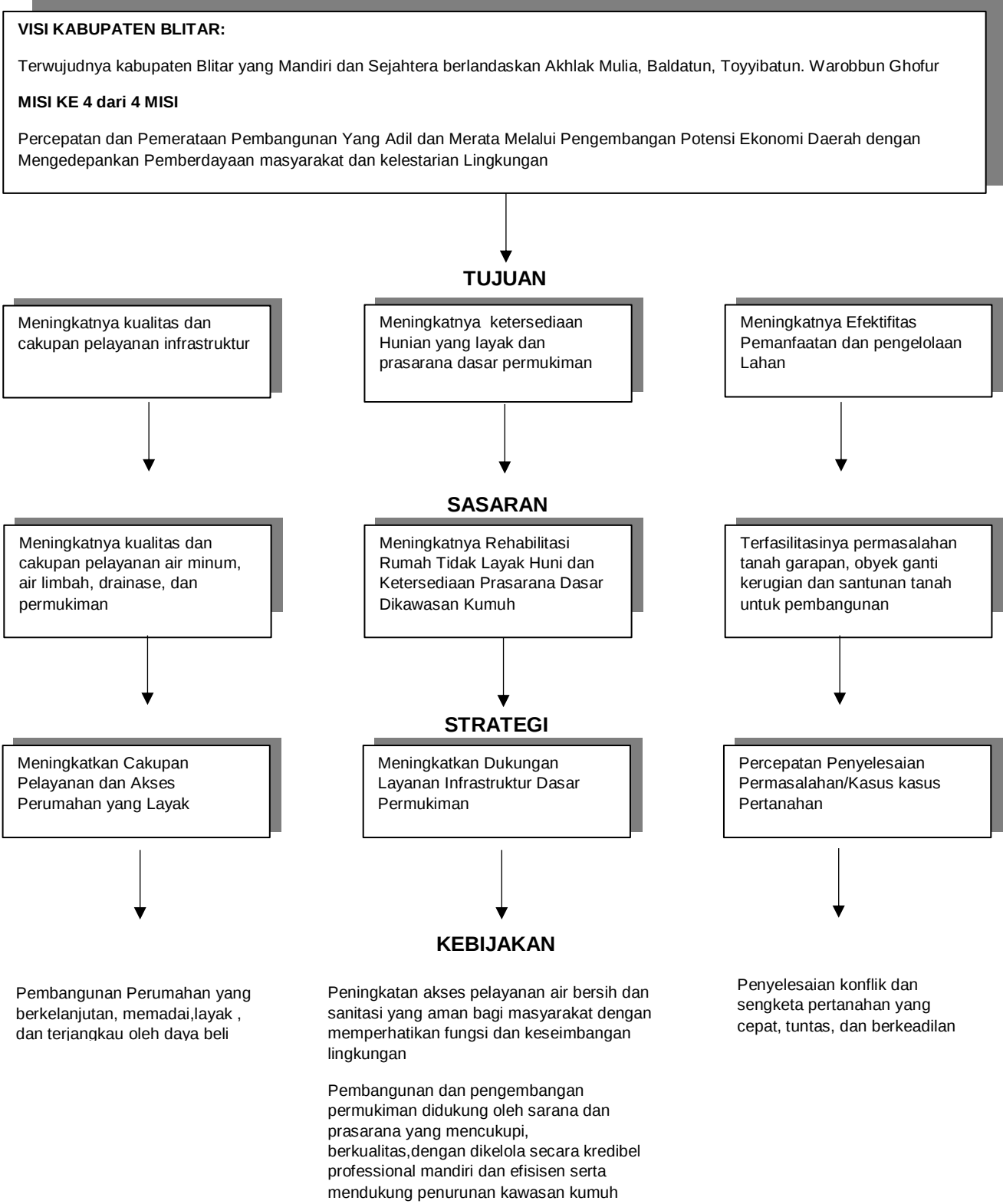
Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama 5 tahun kedepan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu selama 5 tahun.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Misi pemerintah sesuai dengan sasaran nya adalah meningkat cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Permukiman dan efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Penyajian strategi dan arah kebijakan pada tabel di bawah menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Gambar 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI KABUPATEN BLITAR: Terwujudnya kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun. Warobbun Ghofur			
MISI KE 4 dari 4 MISI Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan masyarakat dan kelestarian Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Akses Perumahan yang Layak	Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak , dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
Meningkatnya ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman	Meningkatkan Dukungan Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman	Peningkatan akses pelayanan air bersih dan sanitasi yang aman bagi masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan
			Pembangunan dan pengembangan permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi, berkualitas, dengan dikelola secara kredibel profesional mandiri dan efisien serta mendukung penurunan kawasan kumuh
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	Terfasilitasinya permasalahan tanah garapan, obyek ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Percepatan Penyelesaian Permasalahan/Kasus kasus Pertanahan	Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang cepat, tuntas, dan berkeadilan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada pembahasan Bab sebelumnya telah dikemukakan tujuan, sasaran Strategi dan Kebijakan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar periode 2021 - 2026 Sasaran dan indikator sasaran tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar. Selanjutnya akan dievaluasi diakhir masa periode perencanaan.

Pada Bab VI ini dikemukakan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar 2021 – 2026.

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Prosentase RT berakses infrastruktur permukiman	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah penduduk berakses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dibagi jumlah penduduk total	%	82.30%	83.2%	13,635,549,000	84.1%	6,500,000,000	85.0%	7,500,000,000	85.9%	8,500,000,000	86.8%	9,500,000,000	87.7%	9,500,000,000	87,7%	55,135,549,000
			1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdindungi	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdindungi dibagi rumah tangga x 100%	%	82.3%	83.2%	13,635,549,000	84.1%	6,500,000,000	85.0%	7,500,000,000	85.9%	8,500,000,000	86.8%	9,500,000,000	87,7%	9,500,000,000	87,7%	55,135,549,000
			1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen		Dokumen		1	400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	2,900,000,000
			1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah laporan Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		laporan		42	997,787,000	20	750,000,000	20	750,000,000	20	750,000,000	20	75,000,000	20	75,000,000	142	4,747,787,000

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
			1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang ditingkatkan		SR		1973	8,113,142,000	460	2,300,000,000	433	2,600,000,000	429	3,000,000,000	488	3,900,000,000	488	3,900,000,000	4,270	23,813,142,000	
			1	3	3	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Kelompok yang dibina		KPSPAM		114	244,540,000	150	250,000,000	150	250,000,000	150	250,000,000	150	250,000,000	150	250,000,000	864	1,494,540,000	
			1	3	3	2.01	9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR baru		SR		736	3,420,080,000	400	2,000,000,000	400	2,400,000,000	414	2,900,000,000	363	2,900,000,000	363	2,900,000,000	2,675	16,520,080,000	
			1	3	3	2.01	11	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR		SR		40	460,000,000	100	500,000,000	100	600,000,000	100	700,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	540	3,860,000,000	
			1	3	3	2.01	19	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum	Jumlah Kelompok yang dibina		KPSPAM					150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	600	800,000,000
			1	3	3	2.01	4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina		KPSPAM				150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	750	1,000,000,000	
			1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	Jumlah penduduk berakses sistem air limbah domestik dibagi total penduduk	%	72%	72.2%	4,487,751,338	72.3%	4,487,751,338	72.5%	4,487,751,338	72.7%	4,487,751,338	72.8%	4,487,751,338	72.9%	4,487,751,338	72,9%	26,926,508,028	

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
			1	3	5	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik dibagi rumah tangga x 100%	%	72.0 %	72.2 %	4,48 7,75 1,33 8	72.3%	4,48 7,75 1,33 8	72.5 %	4,487,7 51,338	72.7 %	4,487,7 51,338	72.8 %	4,4 87, 75 1,3 38	72.8 %	4,4 87, 75 1,3 38	72.8%	26,9 26,5 08,0 28
			1	3	5	2.0 1	1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten		doku men		1	281,0 60,70 0	1	281,0 60,70 0	1	281,060 ,700	1	281,060 ,700	1	28 1,0 60, 70 0	1	28 1,0 60, 70 0	6	1,68 6,36 4,20 0
			1	3	5	2.0 1	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		kali		2	71,40 0,000	2	7140 0000	2	714000 00	2	714000 00	2	71 40 00 00	2	71 40 00 00	12	428, 400, 000
			1	3	5	2.0 1	12	Pembangun an/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah infrastruktur air limbah terbangun		unit		8	3,299 ,290, 638	8	3,299 ,290, 638	8	3,299,2 90,638	8	3,299,2 90,638	8	3,2 99, 29 0,6 38	8	3,2 99, 29 0,6 38	48	19,7 95,7 43,8 28
			1	3	5	2.0 1	6	Pembangun an penyediaan sub sistem pengolahan setempat	jumlah sub sistem pengolahan setempat		unit		1	836,0 00,00 0	1	836,0 00,00 0	1	836,000 ,000	1	836,000 ,000	1	83 6,0 00, 00 0	1	83 6,0 00, 00 0	6	5,01 6,00 0,00 0

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
			1	3	6			PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/salur an pembuangan air	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air dibagi Panjang jalan x 100%	%	16.6 7%	17%	10,2 95,8 56,2 50	18%	7,50,0 0,00 0,00 0	19%	7,500,0 00,000	20%	8,750,0 00,000	21%	8,7 50, 00 0,0 00	21%	8,7 50, 00 0,0 00	21%	51,5 45,8 56,2 50
			1	3	6	2.0 1		Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran drainase yang dikelola/menj adi kewenangan kabupaten		km		12	10,2 95,8 56,2 50	12	7,50 0,00 0,00 0	12	7,500,0 00,000	13	8,750,0 00,000	13	8,7 50, 00 0,0 00	13	8,7 50, 00 0,0 00	75	51,5 45,8 56,2 50
			1	3	6	2.0 1	12	Pembangun an Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Infrastruktur Drainase Terbangun		Km		12	10,09 5,856 ,250	12	7,000 ,000, 000	12	7,000,0 00,000	12	7,000,0 00,000	12	7,0 00, 00 0,0 00	12	7,0 00, 00 0,0 00	72	45,0 95,8 56,2 50
			1	3	6	2.0 1	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Infrastruktur Drainase yang Ditingkatkan		Km		-	-	-	-	-	-	0.5	1,000,0 00,000	0.5	1,0 00, 00 0,0 00	0.5	1,0 00, 00 0,0 00	2	3,00 0,00 0,00 0
			1	3	6	2.0 1	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Infrastruktur Drainase yang Direhabilitasi		Km		-	-	-	-	-	-	0.5	250,000 ,000	0.5	25 0,0 00, 00 0	0.5	25 0,0 00, 00 0	2	750, 000, 000
			1	3	6	2.0 1	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		Doku men		1	200,0 00,00 0	1	500,0 00,00 0	1	500,000 ,000	1	500,000 ,000	1	50 0,0 00, 00 0	1	50 0,0 00, 00 0	6	2,70 0,00 0,00 0

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
								Drainase Lingkungan																			
			1	4	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah		%	100%	100%	5,57 0,27 0,06 8	100%	5,57 0,27 0,06 8	100%	5,570,2 70,068	100%	5,5 70, 27 0,0 68	100%	5,5 70, 27 0,0 68	100%	5,5 70, 27 0,0 68	100%	33,4 21,6 20,4 08	
			1	4	1	2.0 1		Perencanaa n. Penganggar an. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dibagi jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah x 100%	%	100%	100%	7,51 5,00 0	100%	7,51 5,00 0	100%	7,515,0 00	100%	7,5 15, 00 0	100%	7,5 15, 00 0	100%	7,5 15, 00 0	100%	45,0 90,0 00	
			1	4	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	doku men	3	3	7,515 ,000	3	7,515 ,000	3	7,515,0 00	3	7,5 15, 00 0	3	7,5 15, 00 0	3	7,5 15, 00 0	3	45,0 90,0 00	

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
			1	4	1	2.0 2		Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dibagi jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah x 100%	%	100%	100%	4,47 3,42 1,64 8	100%	4,473,4 21,648	100%	4,473,4 21,648	100%	4,4 73, 42 1,6 48	100%	4,4 73, 42 1,6 48	100%	26,8 40,5 29,8 88		
			1	4	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan		Oran g	40	40	4,251 ,261, 648	40	4,251,2 61,648	40	4,251,2 61,648	40	4,2 51, 26 1,6 48	40	4,2 51, 26 1,6 48	40	25,5 07,5 69,8 88		
			1	4	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan PD		Lapor an	4	4	222,1 60,00 0	4	222,160 ,000	4	222,160 ,000	4	22 2,1 60, 00 0	4	22 2,1 60, 00 0	4	1,33 2,96 0,00 0		
			1	4	1	2.0 6		Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dibagi Jumlah administrasi umum x 100%	%	100%	100%	492, 687, 100	100%	492, 687, 100	100%	492,68 7,100	100%	492,68 7,100	100%	49 2,6 87, 10 0	100%	49 2,6 87, 10 0	100%	2,95 6,12 2,60 0
			1	4	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan		Jenis	2	2	1,000 ,000	2	1,000,0 ,000	2	1,000,0 ,000	2	1,0 00, 00 0	2	1,0 00, 00 0	2	6,00 0,00 0		
			1	4	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	2	2	204,6 96,00 0	2	204,696 ,000	2	204,696 ,000	2	20 4,6 96, 00 0	2	20 4,6 96, 00 0	2	1,22 8,17 6,00 0		
			1	4	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Jenis	2	2	33,17 0,000	2	33,170, 000	2	33,170, 000	2	33, 17 0,0 00	2	33, 17 0,0 00	2	199, 020, 000		

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3				4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19					
			1	4	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Jenis	2	2	5,205 ,000	2	5,205 ,000	2	5,205,0 00	2	5,205,0 00	2	5,2 05,00 0	2	5,2 05,00 0	2	31,2 30,0 00
			1	4	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Ekse mplar	5,000	5,000	35,51 1,100	5,000	35,51 1,100	5,000	35,511, 100	5,000	35,511, 100	5,000	35,51 1,100	5,000	35,51 1,100	213, 066, 600	
			1	4	1	2.0 6	9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD		Kali	100	100	213,1 05,00 0	100	213,1 05,00 0	100	213,105 ,000	100	213,105 ,000	100	21 3,105, 000	100	21 3,105, 000	1,27 8,63 0,00 0	
			1	4	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah x 100%	100%	100%	100%	83,2 76,0 00	100%	83,2 76,0 00	100%	83,276, 000	100%	83,276, 000	100%	83, 27 6,000	100%	83, 27 6,000	499, 656, 000	
			1	4	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		Unit	4	4	83,27 6,000	4	83,27 6,000	4	83,276, 000	4	83,276, 000	4	83, 27 6,000	4	83, 27 6,000	499, 656, 000	
			1	4	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dibagi Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100%	100%	337, 278, 320	100%	337, 278, 320	100%	337,27 8,320	100%	337,27 8,320	100%	33 7,278, 320	100%	33 7,278, 320	2,02 3,66 9,92 0	

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
														Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
														Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3						4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
			1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bula n	12	12	71,87 8,320	12	71,87 8,320	12	71,878, 320	12	71,878, 320	12	71, 87 8,3 20	12	71, 87 8,3 20	12	71, 87 8,3 20	12	431, 269, 920
			1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bula n	12	12	14,60 0,000	12	14,60 0,000	12	14,600, 000	12	14,600, 000	12	14, 60 0,0 00	12	14, 60 0,0 00	12	87,6 00,0 00		
			1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Bula n	12	12	250,8 00,00 0	12	250,8 00,00 0	12	250,800 ,000	12	250,800 ,000	12	25 0,8 00, 00 0	12	25 0,8 00, 00 0	12	1,50 4,80 0,00 0		
			1	4	1	2.09		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100%	100%	176, 092, 000	100%	176, 092, 000	100%	176,09 2,000	100%	176,09 2,000	100%	17 6,0 92, 00 0	100%	17 6,0 92, 00 0	100%	1,05 6,55 2,00 0		
			1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n. Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bula n	12	12	95,81 2,000	12	95,81 2,000	12	95,812, 000	12	95,812, 000	12	95, 81 2,0 00	12	95, 81 2,0 00	12	574, 872, 000		
			1	4	1	2.09	9	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan PD yang mendapat pemeliharaan rutin		Jenis	2	2	80,28 0,000	2	80,28 0,000	2	80,280, 000	2	80,280, 000	2	80, 28 0,0 00	2	80, 28 0,0 00	2	481, 680, 000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2	3				4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19
Meningkatnya ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	Prosentase ketersediaan Hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	1	4	2		PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi	Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi dibagi Jumlah rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten x 100%	%	97.25%	97.30%	394,633,200	97.35%	394,633,200	97.40%	394,633,200	97.45%	394,633,200	97.50%	394,633,200	97.55%	394,633,200	97.55%	2,367,799,200
			1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen		2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	12	1,200,000,000
			1	4	2	2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	600,000,000
			1	4	2	2.01	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat bencana		Dokumen		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	600,000,000

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19
			1	4	2	2.0 3		Pembangun an dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tingkat Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%	%	100%	100%	267, 316, 700	100%	267, 316, 700	100%	267,31 6,700	100%	267,31 6,700	100%	26 7,3 16, 70 0	100%	26 7,3 16, 70 0	100%	1,60 3,90 0,20 0
			1	4	2	2.0 3	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi		unit	2	2	227,3 16,70 0	2	227,3 16,70 0	2	227,316 ,700	2	227,316 ,700	2	22 7,3 16, 70 0	2	22 7,3 16, 70 0	12	1,36 3,90 0,20 0
			1	4	2	2.0 3	4	Pembangun an Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun		unit	2	2	40,00 0,000	2	40,00 0,000	2	40,000, 000	2	40,000, 000	2	40, 00 0,0 00	2	40, 00 0,0 00	12	240, 000, 000
			1	4	2	2.0 3	5	Pembangun an Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi masyarakat berdampak relokasi Program Kabupaten/Kot a yang dibangun		unit	2	2	40,00 0,000	2	40,00 0,000	2	40,000, 000	2	40,000, 000	2	40, 00 0,0 00	2	40, 00 0,0 00	12	240, 000, 000
			1	4	2	2.0 6		Penerbitan Izin Pembangun an dan Pengembang an Perumahan	Jumlah rekomendasi ijin pembangunan perumahan		reko m site plan	89	99	127, 316, 500	109	127, 316, 500	119	127,31 6,500	129	127,31 6,500	139	12 7,3 16, 50 0	149	12 7,3 16, 50 0	149	763, 899, 000
			1	4	2	2.0 6	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalia n Pembangun an dan Pengembang an Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi		lapor an		10	127,3 16,50 0	10	127,3 16,50 0	10	127,316 ,500	10	127,316 ,500	10	12 7,3 16, 50 0	10	12 7,3 16, 50 0	60	763, 899, 000

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3				4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	16	17	16	17	18	19			
			1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIM AN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan Kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman dikali 100%	%	0.49 %	0.31 %	10,5 60,2 67,3 40	0.25%	10,5 60,2 67,3 40	0.18 %	10,560, 267,34 0	0.12 %	10,560, 267,34 0	0,05 %	10, 56 0,2 67, 34 0	0.00 %	10, 56 0,2 67, 34 0	0.00%	63,3 61,6 04,0 40
			1	4	3	2.0 2		Penataan dan Peningkata n Kualitas Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh		Doku men		15	766, 806, 784	15	766, 806, 784	15	766,80 6,784	15	766,80 6,784	15	76 6,8 06, 78 4	15	76 6,8 06, 78 4	90	3,83 4,03 3,92 0
			1	4	3	2.0 2	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		doku men		5	150,0 00,00 0	5	150,0 00,00 0	5	150,000 ,000	5	150,000 ,000	5	15 0,0 00, 00 0	5	15 0,0 00, 00 0	30	900, 000, 000
			1	4	3	2.0 2	3	Pembentuk an/Pembinaa n Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		doku men		5	150,0 00,00 0	5	150,0 00,00 0	5	150,000 ,000	5	150,000 ,000	5	15 0,0 00, 00 0	5	15 0,0 00, 00 0	30	900, 000, 000
			1	4	3	2.0 2	8	Penyusunan /Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP		doku men		5	466,8 06,78 4	5	466,8 06,78 4	5	466,806 ,784	5	466,806 ,784	5	46 6,8 06, 78 4	5	46 6,8 06, 78 4	30	2,80 0,84 0,70 4
			1	4	3	2.0 3		Peningkata n Kualitas Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Persentase rumah tidak layak huni		%	2.75 %	2.03 %	9,79 3,46 0,55 6	1.99%	9,79 3,46 0,55 6	1.95 %	9,793,4 60,556	1.91 %	9,793,4 60,556	1.88 %	9,7 93, 46 0,5 56	1.84 %	9,7 93, 46 0,5 56	2.50%	58,7 60,7 63,3 36

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
								(sepuluh) Ha																			
			1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab		unit		200	9,793 ,460, 556	200	9,793 ,460, 556	200	9,793,4 60,556	200	9,7 93, 46 0,5 56	200	9,7 93, 46 0,5 56	1,200	58,7 60,7 63,3 36			
			1	4	3	2.0 3	6	Pelaksanaan Pembangun an Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan permukiman kumuh yang dilakukan Pemugaran/Pe remajaan	ha		38	15,08 0,145 ,212	78	15,08 0,145 ,212	118	15,080, 145,212	158	15,080, 145,212	170	15, 08 0,1 45, 21 2	198	15, 08 0,1 45, 21 2	198	90,4 80,8 71,2 72		
			1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIM AN KUMUH	Persentase pencegahan timbulnya kawasan permukiman kumuh	%	99.5 %	99.5 %	1,00 0,00 0,00 0	99.5%	1,10 0,00 0,00 0	99.5 %	1,120,0 00,000	99.5 %	1,140,0 00,000	99.5 %	1,1 60, 00 0,0 00	99.5 %	1,1 60, 00 0,0 00	99.5%	6,68 0,00 0,00 0		
			1	4	4	2.0 1		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukima n Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tidak layak huni	%		0.68 %	1,00 0,00 0,00 0	0.66%	1,00 0,00 0,00 0	0.65 %	1,000,0 00,000	0.64 %	1,000,0 00,000	0.63 %	1,0 00, 00 0,0 00	0.61 %	1,0 00, 00 0,0 00	2.50%	6,00 0,00 0,00 0		
			1	4	4	2.0 1	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh dilu Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab		unit		50	1,000 ,000, 000	50	1,000 ,000, 000	50	1,000,0 00,000	50	1,0 00, 00 0,0 00	50	1,0 00, 00 0,0 00	300	6,00 0,00 0,00 0			

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
								di Bawah 10 (sepuluh) Ha																			
			1	4	5			PROGRAM PENINGKAT AN PRASARAN A. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kab/ x 100%	%	100%	100%	0	100%	200, 000, 000	100%	240,00 0,000	100%	280,00 0,000	100%	32 0,0 00, 00 0	100%	32 0,0 00, 00 0	100%	1,36 0,00 0,00 0	
			1	4	5	2.0 1		Urusan Penyelengg araan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		ha	40,5 54		40,554	200, 000, 000	40,5 54	240,00 0,000	40,5 54	280,00 0,000	40,5 54	32 0,0 00, 00 0	40,5 54	32 0,0 00, 00 0	40,55 4	1,36 0,00 0,00 0		
			1	4	5	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah rekomendasi penyediaan/re hab PSU perumahan		reko mend asi	3		3	100,0 00,00 0	3	120,000 ,000	3	140,000 ,000	3	16 0,0 00, 00 0	3	16 0,0 00, 00 0	18	680, 000, 000		
			1	4	5	2.0 1	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU permukiman dari Pengembang	Jumlah PSU permukiman yang diserahkan dari pengembang		unit	5		5	100,0 00,00 0	5	120,000 ,000	5	140,000 ,000	5	16 0,0 00, 00 0	5	16 0,0 00, 00 0	30	680, 000, 000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2	3				4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	Terfasilitasinya permasalahan Tanah	Terfasilitasinya permasalahan tanah garapan, obyek ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2	1	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang penanggannya dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	%		100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,600,000,000
			2	1	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang dimediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	%		100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,600,000,000
			2	1	4	2.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang diinventarisasi		kasus		10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	60	1,800,000,000
			2	1	4	2.01	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang dimediasi		kasus		10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	60	1,800,000,000

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	18	19		
			2	1 0	5			PROGRAM PENYELESA IAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	Jumlah obyek Ganti Kerugin dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan dibagi Jumlah obyek Ganti Kerugin dan Santunan tanah untuk Pembangunan x 100%	%		100%	300, 000, 000	100%	300, 000, 000	100%	300,00 0,000	100%	30 0,0 00, 00 0	100%	30 0,0 00, 00 0	100%	1,50 0,00 0,00 0		
			2	1 0	5	2.0 1		Penyelesaia n Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	Jumlah obyek Ganti Kerugin dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan dibagi Jumlah obyek Ganti Kerugin dan Santunan tanah untuk Pembangunan x 100%	%		10	300, 000, 000	10	300, 000, 000	10	300,00 0,000	10	300,00 0,000	10	30 0,0 00, 00 0	10	30 0,0 00, 00 0	60	1,80 0,00 0,00 0
			2	1 0	5	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh	Jumlah obyek Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	Jumlah Fasilitasi	Kali		10	300,0 00,00 0	10	300,0 00,00 0	10	300,000 ,000	10	300,000 ,000	10	30 0,0 00, 00 0	10	30 0,0 00, 00 0	60	1,80 0,00 0,00 0

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	DO INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	Sat uan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1		2	3					4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	16	17	18	19	
								Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada pembahasan Bab IV, dikemukakan tujuan, sasaran Strategi dan Kebijakan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar periode 2021 - 2026 Sasaran dan indikator sasaran tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar. Selanjutnya akan dievaluasi diakhir masa periode perencanaan.

Pada Bab VII ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar 2021 - 2026 Indikator-indikator ini merupakan indikator pilihan dari indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diuraikan pada Bab IV terdahulu. Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1.dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase	82.30%	83.20%	84.10%	85.00%	85.89%	86.79%	87,7%
2	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	82.30%	83.20%	84.10%	85.00%	85.89%	86.79%	87,7%
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase	82.30%	83.20%	84.10%	85.00%	85.89%	86.79%	87,7%
4	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	72.00%	72.20%	72.30%	72.50%	72.70%	72.80%	72,9%
6	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	Persentase	16.67%	17%	18%	19%	20%	21%	21%
B.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	ha	14.3	12	10	8	6	4	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	unit	200	200	200	200	200	200	200
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
C.	Urusan Pertanahan								
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK		608	325	238	250	318	290

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	bidang		608	325	290	333	318	290
3	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	ha	4	4	4	4	4	4	24

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

8.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra

Beberapa hal yang menjadi kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 2022-2026 sesuai dengan rencana tugas dan fungsi untuk mencapai target sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 sd 2026

3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Dinas Perkum yg diperoleh dari evaluasi hasil Renja Dinas Perkum secara periodik.